

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan rencana lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai peluang, kendala dan tantangan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan.

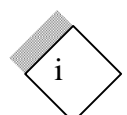
Penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Didalam RENSTRA ini merumuskan Visi Misi, Strategi, Arah Kebijakan dan langkah-langkah capaian kegiatan dalam upaya mendukung Visi Provinsi Jambi **“Terwujudnya Provinsi Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera (TUNTAS) 2021 “**.

Dengan disusunnya Perubahan RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 ini, maka Dinas Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai dokumen untuk lima tahun kedepan dalam pengembangan serta pembangunan dibidang Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi.

Jambi, Oktober 2018

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jambi,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006



DAFTAR ISI

	Halaman	
Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	2	
1.3. Maksud dan Tujuan	4	
1.4. Sistematika Penulisan	4	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6	
2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan.....	22	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	23	
2.5. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan	25	
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26	
3.2. Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27	
3.3. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra	29	
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	34	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	35	
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah...	37	
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		39
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		41
BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		44
BAB VIII.PENUTUP		47

Daftar Lampiran

Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra 2010 – 2015

Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Renstra 2010 - 2015

Tabel T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tabel T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD



BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maupun regional, perlu disusun suatu perencanaan strategik, yaitu berupa proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin akan timbul.

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Mengacu kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan dalam mewujudkan ***Jambi Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (JAMBI TUNTAS 2021)***.

Ketahanan pangan adalah Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, aktif, produktif, dan berkelanjutan (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012). Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan nasional, penentu kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan dimasa depan.

Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, masih adanya kasus-kasus kerawanan pangan di tengah-tengah masyarakat, terjadinya bencana alam yang merusak sumberdaya alam, perubahan iklim yang sulit diprediksi, munculnya krisis energi, alih fungsi lahan potensial tanaman pangan ke pemukiman dan tanaman industri merupakan masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan selain merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan hak azasi manusia yang harus dipenuhi juga merupakan komoditas strategis yang dapat menentukan arah politik pemerintah. Lemahnya ketahanan pangan pada suatu wilayah mencerminkan peringkat kerawanan pangan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang bermuara pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia.



Pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan ketahanan pangan tahun 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, mencakup yaitu: Peningkatan produksi pangan pokok, Stabilitas harga dan pasokan pangan pokok, Perbaikan kualitas pangan dan gizi masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan *stakeholder* utama di bidang pangan dan Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk komoditas pangan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; pemantapan distribusi dan cadangan pangan; serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan.

Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan nasional sebagai produsen, konsumen, dan perdagangan; sedangkan pemerintah sebagai *supporting system* dalam pengaturan, fasilitasi, memotivasi, dan regulasi untuk mendukung kegiatan masyarakat secara konstruktif-produktif.

1.2. Landasan Hukum

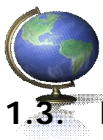
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi. Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

Berbagai peraturan dan perundangan lainnya yang menjadi landasan hukum :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025);
- e. Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016 - 2021.
- l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
- n. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.



1.3. Maksud dan Tujuan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan instansi yang berperan dalam melaksanakan teknis di bidang ketahanan pangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 adalah :

- a. Meningkatkan pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan;
- c. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai kemandirian pangan;
- e. Mewujudkan pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih



- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, maka tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi adalah membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Sekretariat

Tugas Pokok :

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

Fungsi Sekretariat :

- (1). Pengkoordinasian Pengkordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
- (2). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- (3). Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- (4). Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (5). Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- (6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yakni Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Umum, dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

A. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Tugas :

Membantu sekretariat dalam rangka melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan dinas.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
- (2). Pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
- (3). Pelaksanaan penyusunan anggaran;
- (4). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;



- (5). Pelaksanaan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (6). Pelaksanaan Pengelolaan data dan kerja sama; dan
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Umum

Tugas :

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan urusan keuangan;
- (2). Pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- (3). Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- (4). Pelaksanaan Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- (5). Pelaksanaan Penyusunan laporan keuangan;
- (6). Penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- (7). Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- (8). Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- (9). Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- (10). Penyusunan instrumen analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (11). Pelaksanaan urusan hukum dan perundang-undangan;
- (12). Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- (13). Pelaksanaan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan
- (14). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1.2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tugas Pokok:

Membantu dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan kerawanan pangan.

Fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) seksi, yaitu :

A. Seksi Ketersediaan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- (7). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
- (11). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
- (12). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



B. Seksi Sumberdaya Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya; dan
- (6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Kerawanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;



- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- (6). Pelaksanaan Penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- (10). Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tugas Pokok:

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi cadangan pangan.

Fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;



- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

A. Seksi Distribusi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- (8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



B. Seksi Harga Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



C. Seksi Cadangan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- (5). Pelaksanaan Penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- (8). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan

Tugas :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi dan keamanan pangan.



Fungsi :

- (1). Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (2). Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (3). Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (4). Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (5). Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (6). Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- (7). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut :

A. Seksi Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;



- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan penghitungan pola pangan harapan (PPH) tingkat konsumsi;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;



- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- (10). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- (11). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Seksi Keamanan Pangan

Tugas :

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.



Fungsi :

- (1). Pelaksanaan Penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (2). Pelaksanaan Penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (3). Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (4). Pelaksanaan Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- (5). Pelaksanaan Penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- (6). Pelaksanaan Penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- (7). Pelaksanaan Penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- (8). Pelaksanaan Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- (9). Pelaksanaan Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- (10). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



2.1.5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:

- (1). Analis Ketahanan Pangan;
- (2). Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
- (3). Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
- (4). Jabatan fungsional lainnya.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

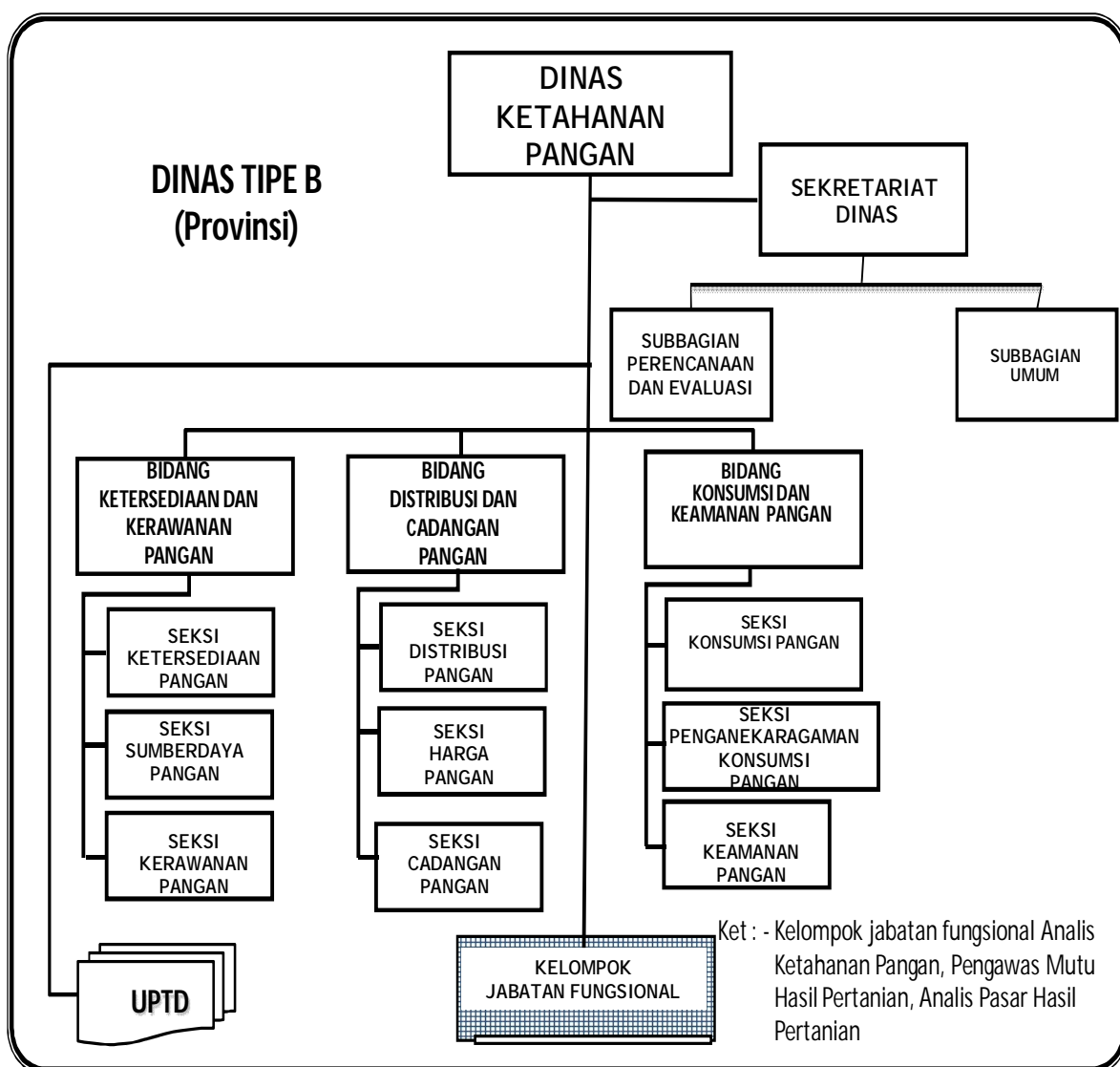
- (1). **Jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan analisis di bidang ketersediaan pangan, akses pangan, dan kerawanan pangan;
 - b. Melakukan analisis di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Melakukan analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan; dan
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2). **Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan pengawasan mutu hasil pertanian;
 - b. Melakukan pengujian mutu hasil pertanian; dan
 - c. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3). **Jabatan fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian** mempunyai tugas antara lain:
 - a. Melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;



- b. Melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
- c. Melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan
- d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.6. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 8 November 2016, struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi digambarkan sebagai berikut :





2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan

Susunan Kepegawaian

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO	GOL	LAKI – LAKI							PEREMPUAN					JML	TOTAL
		S.	S.	S.	D.3	SLTA	SD	JML	S.	S.	S.	D.3	SLTA		
		3	2	1					3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	18	19
1	I A														
	I B														
	I C														
	I D														
2	II A						2	2							2
	II B					1		1					1	1	2
	II C														
	II D					1		1				1		1	2
3	II I A			2		2		4			2			2	6
	II I B			5		9		14		1	8		8	17	31
	II I C			6				6		2	1			3	9
	II I D			11				11			10	1		11	22
4	IV A			1				1							1
	IV B		1	1				2							2
	IV C			1				1		1					2
	IV D														
	IV E														
JUMLAH			1	27		13	2	43		4	21	2	9	36	79



Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

NO	KETERANGAN PEGAWAI	GOLONGAN II			GOLONGAN III			GOLONGAN IV			TOTAL
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	PEJABAT STRUKTURAL				5	4	9	3	2	5	14
√	JUMLAH				5	4	9	3	2	5	14
B.	PEJABAT FUNGSIONAL				2	3	5				5
√	JUMLAH				2	3	5				5
C.	PELAKSANA/STAF	4	2	6	28	26	54				60
√	JUMLAH	4	2	6	28	26	54				60
D.	CPNS (CAPEG)										
√	JUMLAH										
JUMLAH KESELURUHAN		4	2	6	35	33	68	3	2	5	79

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering Tahun 2016

NO	UNIT KERJA	ESELON II			ESELON III						ESELON IV			TOTAL
		A			A			B			A			
		LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	LK	PR	JLH	
1	2	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27
	BKP Prov. Jambi	1		1	2	2	4				5	4	9	
		1		1	2	2	4				5	4	9	14

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melakukan Pencapaian-pencapaian Kinerja Pelayananannya dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan dalam Renstra maupun RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2010 – 2015, hal tersebut guna menjadi dasar kondisi awal atau eksisting pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun selanjutnya yaitu 2016 – 2021.



Secara keseluruhan pencapaian-pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan tersebut tertuang pada :

- lampiran tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Renstra 2010-2015.
- lampiran tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Renstra 2010-2015.

Secara khusus untuk pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada tahun 2016 sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi
1	Meningkatnya skor PPH Ketersediaan Pangan	1. Skor PPH Ketersediaan	85,2	85,9
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan 1 % per tahun	1. % Penurunan penduduk rawan pangan 2. Desa mandiri pangan	19 % 10 Desa	13,97% 10 Desa
3	Ketersediaan Energi Minimal 2.400 Kkal/Kap/Hari dan Protein 65 Gram/Kap/Hari	1. Ketersediaan energi minimal 2.400 2. kkal/kap/hari 3. Skor PPH Ketersediaan Protein 65 gram/kap/hari	2.400 63 80,5	2.854 64,86 80,35
4	Stabilnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen	1. Stabilnya Harga Pangan Pokok (Beras) 2. Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 10% CV < 30%	CV < 10% CV < 30%
5	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan pangan	1. Ketersediaan Cadangan pangan (ton beras) 2. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan 3. Jumlah lembaga petani yang diberdayakan	77,2 Ton 21 Unit 5 Unit	0 19 Unit 5 Unit
6	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Menurunnya tingkat konsumsi beras (1 kg/tahun) 2. Terpenuhinya konsumsi energi 3. Terpenuhinya konsumsi protein 4. Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi	92 kg/kap/thn 2.040 kkal/kap/hr 55 gr/kap/hr 67%	84,4 kg/kap/thn 2.121 kkal/kap/hr 59,5gr/kap/hr 50%



2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Peluang

1. Telah terbentuknya kelembagaan ketahanan pangan di tingkat Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007;
2. Ketahanan Pangan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat.
3. Tersedianya potensi pengembangan pangan lokal.
4. Tersedianya tenaga penyuluh di Kabupaten/kota dan lapangan;
5. Adanya kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah mengenai Ketahanan Pangan;
6. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dikonsumsi;
7. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi pangan yang dapat digarap;
8. Adanya kader-kader pangan di lapangan.

2.4.2. Tantangan

1. Rendahnya pemahaman aparat terkait peran kelembagaan ketahanan pangan.
2. Tradisi/budaya masyarakat masih tergantung pada satu komoditi pangan pokok (beras) dalam pemenuhan karbohidrat.
3. Belum terciptanya kesamaan persepsi aparat pemerintah dalam hal ketahanan pangan;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan kondisi aktual yang mempengaruhi ketahanan pangan di Provinsi Jambi dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan dalam ketahanan pangan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan khususnya pada kondisi ketersediaan energi dan protein secara umum memiliki kecenderungan penurunan yang disebabkan penurunan produksi beberapa komoditas pangan sumber protein.
2. Produksi dan kapasitas produksi pangan semakin terbatas karena :
 - a. Konversi lahan pangan ke non pangan.
 - b. Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan.
 - c. Perubahan iklim.
 - d. Masih rendahnya penerapan teknologi ditingkat petani.
 - e. Masih adanya pemotongan ternak betina produktif.
 - f. Adanya gangguan hama dan penyakit.
3. Jumlah permintaan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dan penggunaan pangan.
4. Masih adanya daerah yang beresiko kerawanan pangan.
5. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efesiensi sistem pemasaran hasil – hasil pangan.
6. Kualitas dan Kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang ditandai dengan skor PPH yang masih rendah.
7. Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan masih belum maksimal karena keterbatasan anggaran.



8. Adanya cemaran berbagi jenis kimia, biologis dan fisik lainnya pada bahan pangan yang dapat menimbulkan penyakit.
9. Dalam pelaksanaan administrasi masih mengalami kendala yang segera diperbaiki.

3.2. Telaah Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Keterkaitan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih dengan pencapaian misi dan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ingin diwujudkan periode 5 (lima) tahun 2016 – 2021, sebagai berikut :

Visi Gubernur Jambi 2016 – 2021			
JAMBI TUNTAS 2021			
Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021			
Misi Gubernur Jambi 2016 – 2021 Jambi Tuntas 2021		Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2016 – 2021	
		Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.	-	-
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.	-	-
3.	Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.	-	-
4.	Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.	1. Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan 3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hari dan Protein 63 gram/kap/hari 4. Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen. 5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masy untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan. 6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
5.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	-	-
6.	Terwujudnya Masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.	-	-



**Telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
Tahun 2016 – 2021**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih		Permasalahan Pelayanan	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 :	Meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik.	-	-	-
	Program :		-	-	-
2.	Misi 2 :	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.	-	-	-
	Program :		-	-	-
3.	Misi 3 :	Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat.	-	-	-
	Program :		-	-	-
4.	Misi 4 :	Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan.		1 Sarana dan prasarana transportasi di dan dari sentra produksi belum memadai. 2 Teknologi pengolahan pangan lokal masih sangat terbatas dalam upaya pemenuhan sebagian kebutuhan energi dan umbi-umbian. 3 Keterbatasan teknologi dan sarana dalam menyiasati perubahan iklim global untuk memproduksi bahan pangan pokok.	1. Landasan hukum yang kuat berupa Perda Dinas Ketahanan Pangan, Pergub tentang P2KP, SE tentang P2KP, SK Gub tentang DKP dan MOU dengan PKK tentang kerjasama pelaksanaan P2KP. 2. SDM yang memadai yaitu tersedia aparatur menurut gol tingkat pendidikan yang cukup, personil OKKPD, PPNS, Penyuluh dan Kader Pangan. 3. Sudah terbentuk kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sampai ke Kab/Kota, Kec dan Desa 4. Dukungan pendanaan dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota 5. Tersedianya regulasi teknis dalam berbagai aspek yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pengembangan IPTEKIN serta penguatan desa. 6. Kebijakan untuk mem perbaiki kondisi jalan sentra produksi 7. Tersedianya perangkat lunak untuk melakukan analisis dan kajian-kajian.
	Program :	Peningkatan Ketahanan Pangan			
5.	Misi 5 :	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.	-	-	-
	Program :		-	-	-
6.	Misi 6 :	Terwujudnya Masyarakat Jambi yang mampu memenuhi hak dasarnya baik ekonomi, sosial, politik dan budaya.	-	-	-
	Program :		-	-	-



3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional dalam RPJM 2015-2019 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan penganeekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

1. Faktor Penghambat

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

2. Faktor Pendorong

- a. Landasan Hukum yang kuat berupa undang-undang pangan No. 18 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi :
 - (1). Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan;
 - (2). Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
 - (3). Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan;



- (4). Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Pencapaian outcome Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan :
- (1). Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dan menurunnya jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun, melalui :
- Monitoring dan Pengawasan Kinerja Penggilingan Padi Menunjang Stok Beras Nasional;
 - Analisis Neraca Bahan Makanan;
 - Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - Peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA);
 - Kawasan Mandiri Pangan; dan
 - Pemantauan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2). Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga/ *Smallholder Livelihood Development (SOLID)*, melalui :
- Pemberdayaan petani kecil dan gender;
 - Dukungan produksi pertanian dan pemasaran;
 - Pengembangan rantai nilai tanaman perkebunan; dan
 - Dukungan manajemen dan administrasi SOLID
- c. Pencapaian Outcome Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan :
Meningkatnya kemampuan kelembagaan distribusi dan cadangan pangan serta stabilitas harga pangan, melalui :
- (1). Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia;
- (2). Lembaga distribusi pangan masyarakat;
- (3). Lumbung pangan masyarakat;
- (4). Panel harga pangan nasional dan pemantauan harga dan pasokan pangan HBKN;



- (5). Pemantauan pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan;
 - (6). Kajian Responsif dan Antisipatif Distribusi Pangan; dan
 - (7). Kajian Distribusi Pangan.
- d. Pencapaian outcome Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan :
- Meningkatnya pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan segar, melalui :
- (1). Pemberdayaan pekarangan pangan;
 - (2). Pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - (3). Gerakan Diversifikasi Pangan;
 - (4). Analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan;
 - (5). Model pengembangan pangan pokok lokal; dan
 - (6). Pengawasan keamanan dan mutu pangan;
- e. Pencapaian outcome Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Dinas Ketahanan Pangan :
- (1) Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, melalui :
 - Perencanaan, penganggaran, dan kerja sama ketahanan pangan;
 - Pelayanan keuangan dan perlengkapan;
 - Pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan ketahanan pangan
 - Penanganan organisasi, kepegawaian, humas, tata usaha, dan hukum.
 - (2). Meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan, melalui
 - Koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan



Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, yaitu "Terwujudnya **ketahanan pangan** melalui **penganekaragaman pangan** berbasis **sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan**".

Kata-kata kunci dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Ketahanan Pangan :**
Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- **Penganekaragaman Pangan :**
Upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- **Sumber Daya Lokal :**
Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah, komoditas pangan, dan meningkatkan efisiensi.
- **Kedaulatan Pangan :**
Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- **Kemandirian Pangan :**
Kemampuan Negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beranekaragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat.

Dinas Ketahanan Pangan harus berperan sebagai "*lead institution*" dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.



Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Dinas Ketahanan Pangan mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
3. Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
4. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
5. Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
6. Meningkatkan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT).



3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2033

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan dan Pengembangan Pertanian di Pusat Kegiatan Nasional (PKN) - Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.			Tertuang dalam RTRW
2.	Pembangunan dan Pengembangan Pertanian di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) - Peningkatan Ketahanan Pangan. - Penerapan IPTEK, Daya saing perekonomian Provinsi Jambi.			Tertuang dalam RTRW - Semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri dengan pertanian, perkebunan dan perikanan serta sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan. - Pengembangan teknologi pertanian hulu sampai dengan hilir untuk meningkatkan mutu produk pertanian.
3.	Pembangunan dan Pengembangan Pertanian di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) - Peningkatan Ketahanan Pangan serta Pengembangan Pertanian untuk Energi (Bio Fuel).		- semakin tidak terjangkau pangan bagi masyarakat yang akhirnya dapat menurunnya gizi masyarakat.	Tertuang dalam RTRW - Pembangunan diprioritaskan pada pemantapan tata ruang wilayah sebagai respon terhadap kebutuhan lokasi pertanian yang progresif menuju kawasan agropolitan. - Pengembangan Pertanian untuk energi (bio fuel) diprioritaskan pada kawasan andalan yang berbasis pertanian diupayakan agar tarik ulur antara kedua prioritas tersebut tidak bermuara pada semakin tidak terjangkau pangan bagi masyarakat yang akhirnya dapat menurunnya gizi masyarakat.



Telaah KLHS Provinsi Jambi 2016 – 2021

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kebijakan Pembangunan juga harus memperhatikan arahan RTRW sehingga terwujud pemerataan pembangunan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah dan konektivitas antar daerah guna meminimalisir konflik.	Kedaulatan Pangan untuk mencegah alih fungsi lahan.	<ul style="list-style-type: none">- Semakin tingginya aktifitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.- Semakin tingginya resiko bencana erosi dan banjir, menurunkan ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih semakin sedikit.	<ul style="list-style-type: none">- Tertuang dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013 - 2033.- Kedaulatan pangan menjadi penting dan diarahkan untuk disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jambi yang didukung dengan Program-program perlindungan pangan berkelanjutan.- Semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2.	Kebijakan pembangunan yang ditekankan pada peningkatan produktivitas dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan mempertahankan lahan yang berfungsi lindung serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Belum optimalnya kondisi infrastruktur. Daya Saing	<ul style="list-style-type: none">- Kenaikan jumlah penduduk, kebutuhan yang semakin meningkat, jangkauan akses ke lokasi tujuan produksi dan industri.- Kelancaran angkutan barang dan jasa merupakan faktor utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri untuk kelancaran produksi.	<ul style="list-style-type: none">- motivasi dan regulasi ke arah perlindungan dan kedaulatan pangan menjadi keharusan.- Salah satu indikator berkembangnya perekonomian suatu daerah adalah tersedianya prasarana dan sarana transportasi yang mendukung berkembangnya daya saing daerah.

3.5. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi di tentukan isu strategis yang perlu menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya antara lain:

1. Persentase Penduduk dalam kategori Sangat Rawan Pangan Tahun 2017 (angka tahun 2016) Provinsi Jambi sebesar **14,64%**, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan atau belum termanfaatkan, rentannya kesehatan masyarakat di daerah terpencil.



Adapun Indikator Peta Ketahanan Pangan terhadap Kerawanan Pangan sebagai berikut :

ASPEK	PARAMETER/ INDIKATOR
Ketersediaan Pangan	Rasio Konsumsi Normatif per kapita terhadap Produksi Pangan
Akses Pangan dan Penghidupan	Persentase Penduduk Hidup di bawah Garis Kemiskinan
	Persentase Desa yang tidak bisa dilalui Kendaraan Roda Empat
	Persentase Rumah Tangga tanpa Akses terhadap Listrik
Pemanfaatan Pangan	Persentase Rumah Tangga tanpa Akses ke Air Bersih
	Persentase Perempuan buta huruf
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Fasilitas Kesehatan > 5 Km
	Persentase Berat Badan Balita di bawah Standar
	Angka Harapan Hidup

2. Pengelolaan kelembagaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat belum maksimal.
3. Ketidakstabilan harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan merupakan kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan.
4. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian masyarakat belum optimal karena pola pangan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada pemenuhan kalori saja, belum menerapkan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2017 sebesar **84,1** sementara PPH optimal sesuai SPM berada pada kisaran 90-100.
5. Pemberdayaan lumbung pangan sebagai wadah penyimpanan bahan pangan pokok mulai menurun di daerah-daerah sentra produksi.
6. Pekarangan belum diperhitungkan oleh masyarakat sebagai salah satu media yang potensial untuk memproduksi bahan pangan dalam pemenuhan kebutuhan gizi, sedangkan penurunan produksi bahan pangan pokok akibat alih fungsi lahan dan iklim ekstrim sangat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan dari potensi lokal.
7. Keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) belum dianggap begitu penting karena efek residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang tidak langsung dirasakan oleh konsumen.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN,

4.3. Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk **Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan.**

4.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan Tahun 2016-2021 berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan, meliputi:

1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH).
2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan 1% per tahun.
3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hari dan Protein sebesar 63 gr/kap/hari.
4. Stabilitasnya Harga Pangan Pokok dan Strategis di tingkat Produsen dan Konsumen.
5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan.
6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).



Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi 2016-2021

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi (Indikator Kinerja Utama/ IKU Renstra 2016 - 2021)

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan.	- Skor PPH Konsumsi	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85 (Skor PPH)	86 (Skor PPH)	87 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)
		2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan.	1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan.	1 % (19 %)	1 % (18 %)	1 % (17 %)	1 % (16 %)	1 % (15 %)	6 % (14 %)
			2. Desa Mandiri Pangan	10 Desa	15 Desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	22 Desa
		3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/ hari dan Protein 63 gram/kap/ hari.	1. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr
			2. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
			3. Skor PPH Ketersediaan	80,5 (Skor PPH)	82,5 (Skor PPH)	84,5 (Skor PPH)	86,5 (Skor PPH)	88,5 (Skor PPH)	90,5 (Skor PPH)
		4. Stabilnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen.	1. Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %
			2. Stabilnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %
		5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan.	1. Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton Beras)	77,2 Ton Beras	87,2 Ton Beras	84,2 Ton Beras	89,2 Ton Beras	94,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras
			2. Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	5 Buah	8 Buah	11 Buah	14 Buah	17 Buah	20 Buah
			3. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	21 Lumbung	24 Lumbung	27 Lumbung	30 Lumbung	33 Lumbung	36 Lumbung
		6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.	1. Konsumsi beras (kg/kap/thn)	92 kg/kap/thn	91 kg/kap/thn	96 kg/kap/thn	95,5 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn
			2. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.040 kkal/kap/hr	2.050 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	2.100 kkal/kap/hr	2.120 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr
			3. Konsumsi Protein (gr/kap/hari)	55 gr/kap/hari	56 gr/kap/hari	57 gr/kap/hari	57,5 gr/kap/hari	58 gr/kap/hari	58,5 gr/kap/hari
			4. Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi	67 %	69 %	71 %	73%	75 %	77 %



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi yang akan ditempuh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi meliputi:

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan, dan keamanan pangan segar;
2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar;
3. Mendorong peranserta swasta, masyarakat sipil, dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan segar;
4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat;
6. Memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.

5.2. Kebijakan

Kebijakan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan adalah:

1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi daerah menuju swasembada pangan;
2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
3. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis.
4. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
5. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan;



6. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam distribusi, kestabilan harga dan akses pangan.
7. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal.
8. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial.
9. Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.

5.3. Nilai - nilai

Dalam merumuskan dan menentukan keputusan/kebijakan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan menganut nilai-nilai :

1. Kejujuran
2. Kebersamaan
3. Kerjasama
4. Tanggung Jawab
5. Kesetiaan

Nilai-nilai tersebut diatas diambil dari 5 (lima) nilai pilihan terbanyak dari karyawan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Nilai tersebut diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas-tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat- Menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, listrik, dan air.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Kendaraan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
6. Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor.
7. Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat tulis Kantor.
9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik.
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
15. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
16. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

6.2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memenuhi tersedianya sarana prasarana aparatur yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor.
2. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan.
3. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
4. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
5. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
6. Kegiatan Pengadaan Mebeleur.



7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional.
10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
12. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.
13. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan.
14. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional.

6.3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk menyampaikan laporan kinerja dan keuangan yang kegiatannya penyusunan laporan kinerja dan keuangan.

6.4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang kegiatannya yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

6.5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang kegiatannya meliputi Pendidikan dan Pelatihan Formal.

6.6. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Sasaran program ini adalah :

1. Stabilisasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah.
2. Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
3. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat.



4. Terbangunnya kesadaran aparat, petani dan swasta dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi Dewan.
2. Kegiatan Penyusunan Database/ statistik ketahanan pangan.
3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Ketahanan Pangan.
4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program.
5. Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan.
6. Kegiatan Analisis Ketersediaan Pangan.
7. Kegiatan Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan.
8. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat.
9. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP).
10. Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Mandiri Pangan
11. Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
12. Kegiatan Stabilitas Kepastian Harga dan Komoditas Primer (PLDPM).
13. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.
14. Kegiatan Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien.
15. Kegiatan Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan.
16. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah.
17. Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa.
18. Kegiatan Koordinasi Kebijakan Perberasan.
19. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan.
20. Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan.
21. Kegiatan Sosialisasi Sumber Pangan Alternatif.
22. Kegiatan Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi/ Penyerapan Pangan.
23. Kegiatan Pameran Ketahanan Pangan Tk. Nasional dan Regional.
24. Kegiatan Penanganan Keamanan Pangan.
25. Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disajikan pada tabel T-C.27 (lampiran).



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif di bidang ketahanan pangan, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).

Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Dinas Ketahanan Pangan yang diharapkan di masa mendatang.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dalam mendukung program pembangunan daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 menuju JAMBI TUNTAS Tahun 2021 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :



Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan Skor PPH	84.2	85.2	87.1	85.2	86,0	87.0	88.0	88.0
	a. Konsumsi Beras Kg/kap/thn	93	92	91	96	95,5	95	94,5	94,5
	b. Konsumsi Energi Kkal/kap/hr	1.977	2.040	2.050	2.090	2.100	2.120	2.150	2.150
	c. Konsumsi Protein Gr/Kap/hr	54,6	55	56	57	57,5	58	58,5	58,5
2	Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan								
	a. Persentase penduduk beresiko rawan pangan (%)	21.56	19	18	17	16	15	14	14
	b. Desa Mandiri Pangan	-	10	15	16	18	20	22	22
3	Aspek Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan								
	a. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	19	21	24	27	30	33	36	36
	b. Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	3	5	8	11	14	17	20	20
	c. Ketersediaan Cadangan Pangan	77,2	77,2	87,2	84,2	89,2	94,2	99,2	99,2



Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	$PPH = \% \text{ Angka Kecukupan Gizi (AKG)} \times \text{Bobot Masing-masing Kelompok Pangan}$
Penguatan Cadangan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100\%$
Penanganan Daerah Rawan Pangan	Menjumlahkan 3 Indikator : 1. Pertanian : Ketersediaan Pangan = $\frac{\text{Ketersediaan} : \text{Kebutuhan Beras}}{(n \text{ gizi} < -2 \text{ SD})} \times 100\%$ (n balita yang dikumpulkan PSG) 2. Kesehatan : Preferensi Energi 3. Sosial Budaya : Kemiskinan karena prasejahtera dan sejahtera - Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu Syarat sebagai keluarga sejahtera. - Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi Kebutuhan dasarnya secara minimal.
ASPEK DAYA SAING DAERAH	
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT}}{\text{Jumlah RT}}$
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita	$\frac{\text{Total Pengeluaran RT Non Pangan}}{\text{Total Pengeluaran}} \times 100\%$

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah

BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$
Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari : $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Kalori} \times \text{BDD}}{100}$ Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari : $\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan Protein} \times \text{BDD}}{100}$
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	$\frac{\text{Jumlah Sampel Pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah Total Sampel Pangan yang di Perdagangan Pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran Yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu}} \times 100\%$



BAB VIII **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi 2016 – 2021. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.



LAMPIRAN

TABEL T-C.23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RENSTRA 2010 - 2015 BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Norma Standar,	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-							
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
I.	1. Tersedianya Energi Minimal 2.200 kkal/kap/hr dan Protein 57 gr/kap/hr.		1. Dipertahankannya Ketersediaan Energi per min, 2.200 kkal/hari	- Ketersediaan Energi Min 2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	2.200 kkal/kap/hr	3.224 kkal/kap/hr	3.409 kkal/kap/hr	3.113 kkal/kap/hr	3.186 kkal/kap/hr	3.217 kkal/kap/hr	3.204 kkal/kap/hr	147%	155%	142%	145%	146%	146%		
				- Ketersediaan Protein Min 57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	75,28 gr/kap/hr	78,35 gr/kap/hr	70,51 gr/kap/hr	75,23 gr/kap/hr	75,59 gr/kap/hr	76,43 gr/kap/hr	132%	137%	124%	132%	133%	134%		
				- 120 ton setara beras di tahun 2015	- ton setara beras	- ton setara beras	60 ton setara beras	80 ton setara beras	100 ton setara beras	120 ton setara beras	0 ton setara beras	0 ton setara beras	0 ton setara beras	70 ton setara beras	90 ton setara beras	0 ton setara beras			0%	88%	90%	0%		
				- Pemerintah (%)	-	10	20	35	50	60	-	10	12	8	6	36		100%	60%	23%	12%	60%		
				- Masy (Klp. Lumbung)	22	36	41	46	50	55	10	12	8	6	0	0	45%	33%	20%	13%	0%	0%		
	2. Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan Minimal 1 % Per Tahun		1. Terlaksananya Pemberdayaan Penduduk Berisiko Rawan Pangan di Desa Mandiri Pangan (Desa).	- 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				- Desa Mandiri Pangan (Desa)	85 Desa	107 Desa	140 Desa	181 Desa	212 Desa	234 Desa	7 Desa	4 Desa	13 Desa	0 Desa	87 Desa	0 Desa	8%	4%	9%	0%	41%	0%		
			2. Terlaksananya Penanggulangan Kerawanan Pangan Baik Kronis Maupun Transien	- 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				- Penanganan Daerah Rawan Pangan (Desa)	11 Kab/Kota	26 Kab/Kota	53 Kab/Kota	80 Kab/Kota	107 Kab/Kota	136 Kab/Kota	7 Kab/Kota	4 Kab/Kota	13 Kab/Kota	0 Kab/Kota	87 Kab/Kota	0 Kab/Kota	64%	15%	25%	0%	81%	0%		
II.	3. Tercapainya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat perkapita dalam memenuhi kecukupan energi 2.000 kkal/kap/hr dan protein 52 gr/kap/hr.		1. Konsumsi Energi/Kap/Hari	- Konsumsi Energi Min 2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	2.000 kkal/kap/hr	1.904 kkal/kap/hr	2.127 kkal/kap/hr	2.158 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	1.958 kkal/kap/hr	1.977 kkal/kap/hr	95%	106%	108%	105%	98%	99%		
				- Konsumsi Protein Min 52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	58,2 gr/kap/hr	60,4 gr/kap/hr	57,7 gr/kap/hr	54,6 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	52 gr/kap/hr	112%	116%	111%	105%	100%	100%		
			2. Skor PPH	- Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,7 PPH	87,9 PPH	89,7 PPH	91,4 PPH	93,2 PPH	95,0 PPH	75,3 PPH	86,0 PPH	89,3 PPH	89,7 PPH	83,3 PPH	83,4 PPH	91%	98%	100%	98%	89%	88%		
	4. Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dalam pemenuhan karbohidrat.		1. Konsumsi energi kelompok bahan pangan padi-padian 50 % AKE	- 50 % AKE	50%	50%	50%	50%	50%	50%	54,60%	56,00%	54,70%	54,40%	54,80%	53,40%	109%	112%	109%	109%	110%	107%		
				- Konsumsi Beras (Kg/Kap/Hr)	105,05 kg/kap/hr	105,7 kg/kap/hr	102,3 kg/kap/hr	99,9 kg/kap/hr	97,5 kg/kap/hr	95 kg/kap/hr	99,2 kg/kap/hr	101,1 kg/kap/hr	104,2 kg/kap/hr	100,0 kg/kap/hr	93,0 kg/kap/hr	94,3 kg/kap/hr	106%	105%	98%	100%	105%	101%		
			2. Konsumsi umbi-umbian 6 % AKE	- 6 % AKE	6%	6%	6%	6%	6%	6%	5,20%	5,00%	5,00%	1,60%	1,50%	2,00%	87%	83%	83%	27%	25%	33%		
	5. Meningkatnya perbaikan penanganan pangan dalam mewujudkan pangan yang aman untuk dikonsumsi melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.		1. Terlaksananya penanganan keamanan pangan segar di Provinsi Jambi	- 11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2. Sertifikasi Prima 3 (Pelaku)	- Sertifikasi Prima 3 (Pelaku)	34	40	45	50	55	60,0	30	15	2	10	0	10	88%	38%	4%	20%	0%	17%		
III.	6. Semakin baik sistem distribusi sehingga mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan fluktuasi harga kurang dari 25 % dari harga normal dari suatu wilayah.		1. LDPM (Gapoktan).	- LDPM (Gapoktan).	22 Gapoktan	26 Gapoktan	30 Gapoktan	40 Gapoktan	54 Gapoktan	70 Gapoktan	2 Gapoktan	4 Gapoktan	4 Gapoktan	0 Gapoktan	30 Gapoktan	3 Gapoktan	9%	15%	13%	0%	56%	4%		
			2. Fluktuasi Harga < 25 % dari harga normal di Wilayah.	- Fluktuasi Harga < 25 % dari harga normal di	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			3. Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan.	- Tersedianya informasi pasokan, harga dan akses pangan.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	7. Meningkatnya Efektifitas Koordinasi Kebijakan Ketahanan Pangan.		- Terlaksananya Koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan	- Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan.	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Jambi, September 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

Tabel T-C.24. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN RENSTRA 2010-2015
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	809.370.000	495.987.000	671.584.600	852.549.300	812.561.050	637.050.290	794.963.000	450.142.000	648.311.389	820.172.881	796.724.364	619.504.992	98,22	90,76	96,53	96,20	98,05	97,25	713.183.707	688.303.104
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.560.000	2.000.000	5.000.000	46.000.000	24.400.000	18.400.000			5.000.000	46.000.000	24.400.000	18.400.000	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	16.226.667	15.633.333
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air	67.400.000	78.600.000	83.800.000	105.000.000	103.000.000	106.600.000			65.291.289	84.516.748	90.129.895	89.150.682	-	-	77,91	80,49	87,50	83,63	90.733.333	54.848.102
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	5.694.000.000	8.927.040	2.752.000			-	5.694.000.000	8.927.040	2.752.000				100,00	100,00	100,00	2.895.507	2.895.507
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	132.210.000	67.450.000	134.275.000	192.430.000	173.945.000	152.622.000			133.340.000	192.278.020	173.492.200	152.567.000	-	-	99,30	99,92	99,74	99,96	142.155.333	108.612.870
5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000	10.672.000	14.984.500	22.961.800	30.280.200	31.537.210			14.984.500	22.961.800	30.280.200	31.537.210	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	20.905.952	16.627.285
6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.395.000	8.250.000	14.661.100	14.460.000	25.168.600	27.793.600			14.661.100	14.460.000	25.168.600	27.793.600	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	22.954.717	13.680.467
7	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	25.325.000	1.500.000	15.850.000	6.250.000	45.720.000	4.000.000			15.850.000	6.250.000	45.229.511	4.000.000	-	-	100,00	100,00	98,93	100,00	16.440.833	11.888.252
8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.250.000	78.925.000	156.400.000	41.579.000	47.447.200	-			152.570.500	41.199.000	45.606.000	-	-	-	97,55	99,09	96,12		103.266.867	39.895.917
9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	3.600.000	3.600.000	8.600.000	8.600.000	5.000.000	5.000.000			8.600.000		5.000.000	5.000.000	-	-	100,00	-	100,00	100,00	5.733.333	3.100.000
10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	31.200.000	24.000.000	27.000.000	52.424.500	34.400.000	34.400.000			27.000.000	52.400.000	34.400.000	34.399.450	-	-	100,00	99,95	100,00	100,00	33.904.083	24.699.908
11	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	166.430.000	165.990.000	115.014.000	357.150.000	314.273.010	253.945.480			115.014.000	354.413.813	314.090.918	253.905.050	-	-	100,00	99,23	99,94	99,98	228.800.415	172.903.964
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi/Teknis Pemda	24.000.000	55.000.000	96.000.000	-					96.000.000				-	-	100,00				29.166.667	16.000.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	587.650.000	489.025.000	381.670.000	895.705.000	349.524.000	281.254.520	586.650.000	485.270.000	368.740.000	825.402.425	327.582.679	280.799.768	99,83	99,23	96,61	92,15	93,72	99,84	497.471.420	479.074.145
1	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	99.500.000												-	-					16.583.333	-
2	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	252.050.000	345.455.000	167.050.000	353.410.000	48.000.000	-			159.120.000	339.480.825	47.387.273	-	-	-	95,25	96,06	98,72		194.327.500	90.998.016
3	Kegiatan Pengadaan Mebelur	-	-			-	2.474.520					-	2.466.403			-			99,67	412.420	411.067
4	Kegiatan Pengadaan Komputer	-	-			-	34.300.000					-	33.856.020			-			98,71	5.716.667	5.642.670
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	143.000.000	35.000.000	25.000.000	191.500.000	146.600.000	72.000.000			25.000.000	151.513.600	142.689.421	72.000.000	-	-	100,00	79,12	97,33	100,00	102.183.333	65.200.504
6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	73.500.000	98.570.000	153.120.000	135.320.000	108.900.000	146.480.000			148.120.000	120.177.000	91.551.985	146.477.345	-	-	96,73	88,81	84,07	100,00	119.315.000	84.387.722
7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor			36.500.000	29.000.000	46.024.000	26.000.000			36.500.000	28.941.000	45.954.000	26.000.000		-	100,00	99,80	99,85	100,00	22.920.667	22.899.167
8	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	19.600.000	10.000.000											-	-				-	4.933.333	-
9	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor				186.475.000	-	-			-	185.290.000	-		-	-		99,36		-	31.079.167	30.881.667
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	46.000.000	30.450.000	41.800.000	35.200.000	37.200.000	39.200.000	46.000.000	30.145.500	41.091.600	35.165.504	37.032.600	39.131.400	100,00	99,00	98,31	99,90	99,55	99,83	38.308.333	38.094.434
1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	46.000.000	30.450.000	41.800.000	35.200.000	37.200.000	39.200.000	46.000.000	30.145.500	41.091.600	35.165.504	37.032.600	39.131.400	100,00	99,00	98,31	99,90	99,55	99,83	38.308.333	38.094.434
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.425.000	9.000.000	45.000.000	91.800.000	40.000.000	41.310.000	31.425.000	9.000.000	44.355.500	44.557.500	36.100.000	34.615.000	100,00	100,00	98,57	48,54	90,25	83,79	43.089.167	33.342.167
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	31.425.000	9.000.000	45.000.000	91.800.000	40.000.000	41.310.000	31.425.000	9.000.000	44.355.500	44.557.500	36.100.000	34.615.000	100,00	100,00	98,57	48,54	90,25	83,79	43.089.167	33.342.167
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	3.526.312.000	2.561.775.900	3.213.914.400	3.912.120.700	4.548.089.950	3.582.464.190	3.281.218.200	2.410.954.450	2.840.905.168	3.500.252.678	4.298.470.969	3.394.910.914	93,05	94,11	88,39	89,47	94,51	94,76	3.557.446.190	3.287.785.397
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	80.030.000	49.910.000	179.517.500	116.764.500	269.525.000	163.363.500	79.283.000	49.910.000	178.517.350	115.457.500	264.525.000	162.243.550	99,07	100,00	99,44	98,88	98,14	99,31	143.185.083	141.656.067
2	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	41.125.000	43.500.000	91.871.500	151.934.000	172.540.000	201.340.000	39.880.000	42.675.000	64.554.800	110.975.200	165.495.000	196.411.725	96,97	98,10	70,27	73,04	95,92	97,55	117.051.750	103.331.954
3	Pemberdayaan Kelembagaan Penyuluhan	357.558.500						353.046.500						98,74						59.593.083	58.841.083
4	Pengembangan Informasi dan Teknologi Penyuluhan	141.201.000						103.709.500						73,45						23.533.500	17.284.917
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	109.992.500	98.350.000	164.703.000	215.408.000	516.495.000	371.825.000	109.455.000	96.982.500	114.748.000	154.729.020	493.843.490	322.531.095	99,51	98,61	69,67	71,83	95,61	86,74	246.128.917	215.381.518
6	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	46.622.500	39.940.000	83.989.200	840.913.500	484.600.000	287.050.000	46.622.500	39.940.000	83.989.200	762.753.700	442.673.100	284.710.000	100,00	100,00	90,71	91,35	99,18	297.185.867	276.781.417	
7	Penyusunan Data Base Statistik Ketahanan Pangan	111.677.500	50.600.000	63.725.500	86.370.500	108.928.950	109.950.000	110.950.000	45.775.000	62.692.500	86.188.050	108.121.900	109.567.450	99,35	90,46	98,38	99,79	99,26	99,65	88.542.075	87.215.817
8	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	215.085.000	205.287.000	254.030.500	272.524.300	386.190.000	325.639.000	196.285.000	199.039.500	250.548.900	266.718.300	382.313.080	314.287.014	91,26	96,96	98,63	97,87	99,00	96,51	276.459.300	268.198.632
9	Pameran Ketahanan Pangan Tk. Nasional dan Provinsi	96.393.000	96.550.000	159.225.000	112.270.000	516.700.000	263.000.000	86.599.000	89.640.000	128.652.200	106.610.580	486.063.940	241.999.125	89,84	92,84	80,80	94,96	94,07	92,01	207.356.333	189.927.474
10	Analisis Ketersediaan Pangan	91.747.500	80.000.000	109.834.400	92.362.500	101.200.000	129.025.000	90.947.500	80.000.000	107.885.300	90.160.000	100.402.300	129.002.400	99,13	100,00	98,23	97,62	99,21	99,98	100.694.900	99.732.917
11	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	220.565.000	360.658.900	276.088.600	285.676.500	219.835.000	219.835.000	220.565.000	359.429.550	275.757.025	283.741.500	217.123.900	219.396.700	100,00	99,66	99,88	99,32	98,77	99,80	263.776.500	262.668.946
12	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	164.122.500	90.000.000	203.182.000	124.221.000	129.595.000	127.546.690	160.332.500	81.150.000	197.567.000	115.020.630	104.144.188	115.694.040	97,69	90,17	97,24	92,59	80,36	90,71	139.777.865	128.984.726
13	Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program KP	185.930.000	130.000.000	155.698.000	185.186.000	156.216.000	173.046.000	173.815.000	125.523.000	146.148.000	174.409.820	152.444.490	145.456.420	93,48	96,56	93,87	94,18	97,59	84,06	164.346.000	152.966.122
14	Peningkatan Penyelenggaraan Program Penyuluh	78.857.500						74.752.500						94,79						13.142.917	12.458.750
15	Stabilitas Kepastian Harga Kualitas Primer (P-LDPM)	223.817.500	229.910.000	334.188.800	402.390.800	319.760.000	323.720.000	215.722.800	220.142.500	310.907.103	279.629.850	304.030.602	307.992.460	96,38	95,75	93,03	69,49	95,08	95,14	305.631.183	273.070.886
16	Analisis Harga Pangan Strategis Provinsi Jambi	79.760.000	51.500.000	296.432.600	153.958.600	182.800.000	178.840.000	72.100.000	50.360.000	125.470.600	136.359.600	173.383.500	173.378.400	90,40	97,79	42,33	88,57	94,85	96,95	157.215.200	121.842.017
17	Otoritas Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	135.810.000	97.620.000					125.295.000	68.611.100					92,26	70,28					38.905.000	32.317.683
18	Bintek Analisis Pola Konsumsi Pangan	132.390.000						132.136.000						99,81						22.065.000	22.022.667
19	Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Diversifikasi Pangan	174.077.																			

**TABEL T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.	1. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan.	1. Skor PPH Konsumsi	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85 (Skor PPH)	86 (Skor PPH)	87 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)
			2. Konsumsi beras (kg/kap/thn)	92 kg/kap/thn	91 kg/kap/thn	96 kg/kap/thn	95,5 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn
			3. Konsumsi Energi (kkal/kap/hr)	2.040 kkal/kap/hr	2.050 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	2.100 kkal/kap/hr	2.120 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr
			4. Konsumsi Protein (gr/kap/hr)	55 gr/kap/hari.	56 gr/kap/hari.	57 gr/kap/hari.	57,5 gr/kap/hari.	58 gr/kap/hari.	58,5 gr/kap/hari.
		2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan.	1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan.	1 % (19 %)	1 % (18 %)	1 % (17 %)	1 % (16 %)	1 % (15 %)	6 % (14 %)
			2. Desa Mandiri Pangan	10 Desa	15 Desa	16 Desa	18 Desa	20 Desa	22 Desa
		3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/ hari dan Protein 63 gram/kap/ hari.	1. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr)	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr
			2. Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
			3. Skor PPH Ketersediaan	80,5 (Skor PPH)	82,5 (Skor PPH)	84,5 (Skor PPH)	86,5 (Skor PPH)	88,5 (Skor PPH)	90,5 (Skor PPH)
		4. Stabilitnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen.	1. Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %
			2. Stabilitnya Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %
		5. Ketersedian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan.	1. Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton Beras)	77,2 Ton Beras	87,2 Ton Beras	84,2 Ton Beras	89,2 Ton Beras	94,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras
			2. Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	5 Buah	8 Buah	11 Buah	14 Buah	17 Buah	20 Buah
			3. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdayakan	21 Lumbung	24 Lumbung	27 Lumbung	30 Lumbung	33 Lumbung	36 Lumbung
		6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.	- Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi Jambi	67 %	69 %	71 %	73%	75 %	77 %

Jambi, September 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C. 26. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : JAMBI TUNTAS 2021 (TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA 2021)			
MISI I : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif yang Berorientasi pada Pelayanan Publik.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Terdidik, Berbudaya, Agamis dan Berkesetaraan Gender.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI III : Menjaga Situasi Daerah yang Kondusif, Toleransi antar Umat Beragama dan Kesadaran Hukum Masyarakat.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI IV : Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Optimalisasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang didukung oleh Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) Berwawasan Lingkungan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.	1. Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). 2. Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan. 3. Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hari dan Protein 63 gram/kap/hari. 4. Stabilitnya Harga Pangan Pokok dan Pangan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen. 5. Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Beras dan Masyarakat untuk mengantisipasi Kerawanan Pangan. 6. Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).	1. Melaksanakan Koordinasi secara sinergis dalam penyusunan kebijakan ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan dan keamanan pangan segar. 2. Mendorong pengembangan cadangan pangan, sistem distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan segar. 3. Mendorong peran serta swasta, masyarakat sipil dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan segar. 4. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan ketahanan pangan masyarakat. 5. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana Masyarakat. 6. Memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis ketahanan pangan melalui mekanisme Dewan Ketahanan Pangan.	1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi daerah menuju swasembada pangan. 2. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif. 3. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis. 4. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan. 5. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan. 6. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam distribusi, kestabilan harga dan akses pangan. 7. Mempercepat panganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal. 8. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial. 9. Mengembangkan keamanan pangan segar di daerah sentra pangan.
MISI V : Meningkatkan Akseibilitas dan Kualitas Infrastruktur Umum, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-
MISI VI : Terwujudnya Masyarakat Jambi yang Mampu Memenuhi Hak Dasarnya baik Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
-	-	-	-

Jambi, September 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.27. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan.		2	03	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran.	NA	-	100%	616,07	100%	677,68	100%	745,45	100%	820,00	100%	901,99	100%	992,19	6	4.753,38			
		2	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	NA	-	10,00	317,60	10,00	349,36	10,00	384,29	10,00	422,72	10,00	464,99	10,00	511,49	60	2.450,45			
		2	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	NA	-	10,00	41,60	10,00	45,76	10,00	50,34	10,00	55,37	10,00	60,91	10,00	67,00	60	320,97			
		2	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	NA	-	10,00	25,00	10,00	30,00	10,00	35,00	10,00	40,00	10,00	45,00	10,00	50,00	60	225,00			
		2	03	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- NILAI SAKIP	-	-	-	80,00	48.640	90,00	67.300	100,00	77.395	110,00	89.004	120,00	102.355	500	384.694				
		2	03	18	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						5.346,00		5.900,1		6.697,5		7.829,9		9.525,1		10.780,1		44.442,63		
		2	03	18	01	Penyusunan Data Base/ Laporan Kondisi Ketahanan Pangan.	- Terlaksananya penyus. Buku Statistik Ketahanan Pangan.	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	175 Buku						
	2	03	18	02	Koordinasi Ketahanan Pangan.	- Rakor Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	14 Kali							
	2	03	18	03	Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi KP	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	7 Kali							
	2	03	18	04	Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program.	1. Terlaksananya Musrenbang Ketahanan Pangan.	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	7 Kali							
						2. Terlaksananya Sinkronisasi Operasional Kegiatan KP.	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	7 Kali								
						3. RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen								
				4. DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen										
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	2	03	18	Program Peningkatan Ketahan Pangan	1. Skor PPH Konsumsi	84,2 (Skor PPH)	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85,2 (Skor PPH)	85,6 (Skor PPH)	86,1 (Skor PPH)	86,6 (Skor PPH)	86,6 (Skor PPH)	86,6 (Skor PPH)	86,6 (Skor PPH)	86,6 (Skor PPH)								
					2. Konsumsi beras (kg/kap/tahun)	93 kg/kap/thn	92 kg/kap/thn	91 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	96 kg/kap/thn	95 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn	94,5 kg/kap/thn								
					3. Konsumsi Energi	1.977 kkal/kap/hr	2.040 kkal/kap/hr	2.050 kkal/kap/hr	2.090 kkal/kap/hr	2.100 kkal/kap/hr	2.120 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr	2.150 kkal/kap/hr								
					4. Konsumsi Protein.	54,6 gr/kap/hr	55 gr/kap/hr	56 gr/kap/hr	57 gr/kap/hr	57,5 gr/kap/hr	58 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr	58,5 gr/kap/hr								
		2	03	18	11	Keg. Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.	a. Tersedianya hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen								
						b. Terselenggaranya Pameran KP Tk. Nasional dan Regional	4 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	40 kali									
						c. Diperoleh Pemenang Lomba Ketahanan Pangan di Tk. Nasional	-	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	11 orang	66 orang										

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
								Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			Target	Rp (000)				
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		2	03	18	13	Keg. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Dava Lokal.	1. Jumlah kader pangan B2SA yang dilatih.	5.150 Kader	330 Kader		330 Kader		330 Kader		330 Kader		330 Kader		330 Kader		7.130 Kader						
							2. Terlaksananya LCM Tk. Nasional & Provinsi.	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		14 kali				
							3. Tersedianya Pangan B2SA Ber basis Sumber daya Lokal.	110 kelompok	110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok		110 kelompok				
							4. Optimalisasi peman faatan pekarangan oleh kelompok wanita.	KWT	10 KWT		55 KWT		55 KWT		55 KWT		55 KWT		55 KWT		55 KWT		285 KWT				
	Menurunnya Jumlah Penduduk Rawan Pangan	2	03	18		Program Peningkatan Ketahan Pangan	1. Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	21,56	1 % (19)		1 % (18)		1,5 % (17,5)		0,5 % (17)		1,5 % (16,5)		0,5 % (16)		0,6 % (16)						
							2. Desa Mandiri Pangan (Desa)		10 Desa		15 Desa		16 Desa		18 Desa		20 Desa		22 Desa		22 Desa						
		2	03	18	06	Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Daerah	a. Diketahuinya daerah-daerah rawan pangan.	11 Kab/kota	131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa		131 Kec 1.372 Desa						
							b. Terlaksananya Rakor Pokja, Pemantauan, Pembinaan dan Workshop Pengemb. Kawasan Mapan	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota				
							c. Meningkatnya Kemampuan Tenaga Pendamping Kawa san Mapan.	11 Kab/kota 87 Desa	2 Kab 10 Desa		3 Kab 15 Desa		4 Kab 20 Desa		6 Kab 25 Desa		8 Kab 45 Desa		10 Kab/kota 55 Desa		11 Kab/kota 55 Desa						
							d. Terdeteksinya daerah beresiko rawan pangan secara dini di tk. Kecamatan	11 Kab/kota 131 Kecamatan	11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan		11 Kab/kota 131 Kecamatan				
							e. Intervensi Daerah Rawan Pangan berdasarkan data FSVA dan SKPG.	131 Kecamatan 1372 Desa	131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa		131 Kecamatan 1372 Desa				
			2	03	18	05	Keg. Pengembangan Sumber Daya Pangan	- Tersedianya Data Base Potensi Sumber Daya Pangan Lokal.	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota					
Ketersediaan Energi Minimal 2.400 kkal/kap/hr dan Protein 63 aram/kao/hari.		2	03	18		Program Peningkatan Ketahan Pangan	1. Skor PPH Ketersediaan.	78,5 (Skor PPH)	80,5 (Skor PPH)		82,5 (Skor PPH)		84,5 (Skor PPH)		86,5 (Skor PPH)		88,5 (Skor PPH)		90,5 (Skor PPH)		90,5 (Skor PPH)						
							2. Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr).	2.400 kkal/kap/hr	2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr		2.400 kkal/kap/hr				
	3. Ketersediaan Protein (qr/kap/hr).						63 qr/kap/hr	63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr		63 qr/kap/hr			
	2	03	18	07	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan.	a. Hasil Analisis Keter sediaan Pangan.	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota							
						b. Terlaksananya Perte muan Apresiasi Keter sediaan Pangan.	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota					
Stabilnya Harga Pangan Pokok & Pangan Strategis di Tk Produsen & Konsumen	2	03	18		Program Peningkatan Ketahan Pangan	1. Stabilitas Harga Pangan Pokok (Beras).	CV < 10%	CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%		CV < 10%							
						2. Stabilitas Harga Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30%	CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%		CV < 30%					
	2	03	18	09	Keg. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok..	- Hasil pemantauan harga pangan pokok/strategis pada hari-hari besar keagamaan	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen							

Tujuan	Sasaran Strategis	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)					
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Masyarakat untuk Mengantisipasi Kerawanan Pangan.	2	03	18	Program Peningkatan Ketahan Pangan	1. Jumlah Lumbung Pangan yang diberdaya kan.	19 Lumbung	21 Lumbung		24 Lumbung		27 Lumbung		30 Lumbung		33 Lumbung		36 Lumbung		36 Lumbung				
						2. Jumlah Lembaga Petani yang diberdayakan	3 Kelp	5 Kelp		8 Kelp		11 Kelp		14 Kelp		17 Kelp		20 Kelp		20 Kelp				
						3. Ketersediaan Cadangan Pangan (Ton Beras)	77,2 Ton Beras	77,2 Ton Beras		84,2 Ton Beras		89,2 Ton Beras		94,2 Ton Beras		99,2 Ton Beras		104,2 Ton Beras		104,2 Ton Beras				
		2	03	18	08	Keg. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	a. Cadangan Pangan Pemerintah	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota			
							b. Cadangan Pangan Masyarakat	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota			
		2	03	18	10	Keg. Pengembangan Distribusi Pangan.	1. Pengembangan Distribusi Pangan Pokok	11 Kab/kota	11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		11 Kab/kota		77 Kab/kota					
							2. Pengembangan Distribusi Pangan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		7 Dokumen			
	Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	2	03	18	Program Peningkatan Ketahan Pangan	- Persentase Peningkatan Pengawasan dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan di Prov. Jambi	65 %	67 %		69 %		71 %		73 %		75 %		77 %		77 %				
						Keg. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan.	1. Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	55 sampel	150 sampel		150 sampel		150 sampel		150 sampel		150 sampel		150 sampel		150 sampel			
							2. Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan	22 req/sertifikat	22 req/sertifikat		22 req/sertifikat		22 req/sertifikat		22 req/sertifikat		22 req/sertifikat		22 req/sertifikat		154 req/sertifikat			

Jambi, September 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006

TABEL T-C.28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,2 (Skor PPH)	85,2 (Skor PPH)	87,1 (Skor PPH)	85 (Skor PPH)	86 (Skor PPH)	87 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)	88 (Skor PPH)
2.	Persentase Penduduk Berisiko Rawan Pangan	21,56 8.593 KK	19 1 %	18 1 %	17 1 %	16 1 %	15 1 %	14 1 %	14 6 %
3.	Stabilitas Harga Pangan a. Pangan Pokok (Beras)	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %	CV < 10 %
	b. Pangan Strategis (Hortikultura)	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %	CV < 30 %
4.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	77,2 Ton Beras	77,2 Ton Beras	87,2 Ton Beras	84,2 Ton Beras	89,2 Ton Beras	94,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras	99,2 Ton Beras

Jambi, September 2018
Kepala Dinas,

Ir. H. AMIR HASBI, ME
Pembina Utama Madya
NIP. 19640406 199303 1 006